

PENGELOLAAN SUMBER DANA PENDIDIKAN DASAR

(Studi Situs SDN Todanan 1)

TESIS

Diajukan Kepada
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan



Oleh :

SUKARDI

NIM.: Q.100080044

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan undangundang tersebut. Peraturan Pemerintah yang telah dikeluarkan dan harus segera dilaksanakan penyesuaian-penyesuaian aturan dibawahnya adalah Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan mengatur tentang standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Dalam aturan tersebut ditetapkan pula kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan/akademik yang berlaku dalam satu tahun pelajaran.

Penerapan standar pembiayaan adalah standar yang mengatur sistem anggaran, pengalokasian anggaran, dan mempertanggung jawabkan biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas: (1) Biaya investasi, (2) Biaya operasi, dan (3) Biaya personal . Administrasi standar pembiayaan akan lebih cepat, tepat, dan mudah dikerjakan apabila menggunakan program komputer, meskipun dengan program yang sangat sederhana.

Gagasan desentralisasi pendidikan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru di negeri ini. Setidaknya dalam fase embrio, gagasan ini sudah menjadi kebijakan resmi negara sejak tahun 1947, dengan terbitnya UU No. 32/1947, di mana daerah berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai kebutuhannya, terutama bidang pertukangan dan kepandaian puteri. Kewenangan yang lebih luas lagi diberikan 3 tahun kemudian lewat UU No. 4/1950 dan jabarannya dalam PP No. 65/1951 yang mendesentralisasikan pengelolaan pendidikan (dasar) kepada daerah dan hak bagi pihak swasta untuk ikut mendirikan sekolah. Meski masih bersifat terbatas dilihat dari ukuran saat ini, rintisan itu dipertegas di masa Orde Baru. UU No. 5/1974 (Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah), UU No. 2/1989 (Sistem Pendidikan Nasional) dan PP No. 28/1990 (Pendidikan Dasar) adalah sebagian instrumen legal yang mendasari inisiatif desentralisasi (Soedibyo, 2005: 1)

Dalam Undang-undang Otonomi Daerah serta Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberi peluang yang cukup besar bagi inovasi pendidikan pada tingkat lokal. Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan di daerah akan memberi implikasi langsung dalam menyusun dan menentukan kurikulum yang dewasa ini bersifat sentralistik dan memberatkan siswa. Demikian pula desentralisasi pendidikan memerlukan aktualisasi dalam semua jenis pendidikan yang diarahkan kepada kebutuhan perkembangan sumber daya manusia yang terdapat di daerah. Disinilah peran penting pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya

dalam hal melaksanakan [tanggung jawab negara](#) demi terciptanya pemerataan di segala bidang dalam hal terlaksananya proses pelaksanaan pendidikan yang tidak terpusat atau harus dilaksanakan secara desentralisasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan relevansi pendidikan adalah adanya keterkaitan dan kesepadanan program pendidikan dan kebutuhan, yang salah satu diantaranya adalah kebutuhan dunia kerja. Dengan memahami potensi sumber daya masing-masing daerah, diharapkan pemerintah daerah lebih meningkatkannya sehingga masalah pendidikan khususnya di daerah yang tertinggal dapat tercapai.

Desentralisasi pendidikan menurut Yuyarti (2004:1) tercantum di dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik. Konsekuensi dari otonomi daerah ini antara lain adanya kewenangan yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur manajemen pengembangan silabus dan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, manajemen pendidikan berbasis pusat perlu diubah menjadi manajemen berbasis sekolah (MBS).

Sebagai Konsekuensi kebijakan ini, maka pelaksanaan konsepsi *school-based Management* dan *community-based education* merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam era otonomi daerah. *School-based management* sebagai konsepsi dasar manajemen pendidikan masa kini merupakan konsep manajemen sekolah yang memberikan kewenangan dan kepercayaan yang luas lagi, sekolah berdasarkan profesionalisme untuk menata organisasi sekolah. Mencari, mengembangkan, dan mendayagunakan *resources* pendidikan yang

tersedia, dan memperbaiki kinerja sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah yang bersangkutan. Sebagian besar sekolah swasta sebenarnya telah melaksanakan konsepsi ini walaupun sebagian dari mereka masih perlu meningkatkan diri dalam upaya mencapai produktivitas sekolah yang diinginkan (Sidi, 2009: 2).

Berkenaan dengan peningkatan produktivitas sekolah menurut Anwar, dkk. (2004: 57) ada dua hal yang selalu menjadi pertanyaan mendasar. Pertama, apa yang menjadi produk pendidikan. Kedua, siapa yang dimaksud dengan pelanggan (*customer*) pendidikan. Guna memperoleh jaminan kualitas produk pendidikan diperlukan: (1) pengawasan yang spesifik terhadap suplai; dan (2) bahan mentah atau bahan baku (*raw material*) harus memenuhi standar yang ditentukan sehingga proses pendidikan dan *outputnya* sesuai dengan spesifikasi yang didefinisikan.

Upaya peningkatan produktivitas sekolah tidak luput dari peran guru. Guru sebagai figur sentral pendidikan dalam melaksanakan kebijakan tersebut merupakan salah satu elemen pendidikan yang memegang peran penting dalam upaya mencetak dan melahirkan generasi-generasi yang demokratis dan bertanggung jawab. Guru memegang peranan strategis dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dari dimensi tersebut, peranan guru sulit digantikan oleh orang lain. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan guru dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses

pendidikan, atau lebih khusus bagi proses pembelajaran, yang diperankan oleh guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi (Saud, 2009: 32).

Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda penting pemerintah (depdiknas) beberapa tahun terakhir menyusul hasil penilaian internasional, seperti PISA 2003 (*Programme for International Student Assessment*) dan TIMSS 2003 (*Trends in International Mathematics and Sciences Study*), yang menempatkan Indonesia pada posisi buntut dalam hal mutu pendidikan. Lebih dari itu, laporan terkini dari UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia tahun 2006 juga masih menempatkan Indonesia pada ranking ke-108 dari 177 negara, jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Singapura (25), Brunei Darussalam (34), dan Malaysia (61) (Faqih, 2007: 2).

Upaya peningkatan mutu pendidikan, tentunya tidak terbatas pada peningkatan kapasitas dan kualitas guru saja, akan tetapi pengelolaan dana pendidikan perlu mendapat perhatian. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas diperlukan biaya yang banyak, pembiayaan pendidikan sangat bervariasi. Oleh karena itu keuangan sekolah atau pembiayaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah menjadi *factor esencial*. Penanggung jawab manajemen pembiayaan pendidikan adalah kepala sekolah dan guru yang ikut bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikan. Guru diharapkan dapat merencanakan pembiayaan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Kebutuhan untuk pembelajaran yang baik tentunya memerlukan pembiayaan yang memadai (Rohiat, 2008: 27).

Biaya pendidikan mempunyai peranan yang menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Dalam teori dan praktek pembiayaan pendidikan dikenal biaya langsung dan biaya tidak langsung (Supriadi, 2006: 4).

Pentingnya pembiayaan dalam pendidikan tersebut menuntut kepala sekolah dan guru untuk melakukan pengelolaan sumber dana pendidikan secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan terutama dalam mengalokasikan penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengelokasian uang sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan (*income generating activities*) sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah (Rohiat, 2008: 66).

Sumber dana pendidikan khususnya di Sekolah Dasar Todanan 1 Blora diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dari pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi maupun Kabupaten dan dana yang berumber dari masyarakat. Tata cara perolehan dana yang bersumber dari pemerintah antara sekolah dasar yang satu dengan sekolah dasar yang lain tentunya sama, karena hal

tersebut telah menjadi ketentuan pemerintah, namun untuk sumber dana yang diperoleh dari masyarakat tiap-tiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda, demikian pula dengan jaringan kerja yang dimiliki sekolah dalam pengelolaan dana sekolah tiap-tiap sekolah mempunyai karakteristik yang berbeda.

Permasalahan pengelolaan keuangan pendidikan timbul ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, dimana dengan masuknya dana dari masyarakat atau dana dari pihak ketiga masuk sekolah harus mempersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang professional dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Substansi pelaksanaan tersebut diantaranya adalah cara memperoleh dana, cara pengelolaan, dan jaringan kerja antara sekolah satu dengan sekolah lainnya.

Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti diuraikan di atas, penelitian ini akan mengkaji pengelolaan sumber dana pendidikan dasar di Sekolah Dasar

Negeri Todanan 1, yang berjudul: Pengelolaan Sumber Dana Pendidikan Dasar (Studi Situs SDN Todanan 1).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitiannya “Bagaimana karakteristik pengelolaan sumber dana pendidikan dasar Sekolah Dasar Negeri Todanan 1”, dengan sub fokus sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik cara memperoleh dana pendidikan dasar di SD Negeri Todanan 1?
2. Bagaimana karakteristik alokasi dana pendidikan dasar di SD Negeri Todanan 1?
3. Bagaimana karakteristik jaringan kerja pengelolaan dana pendidikan dasar di SD Negeri Todanan 1?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian tersebut di atas, secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik pengelolaan sumber dana pendidikan dasar Sekolah Dasar Negeri Todanan 1, dan secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik cara memperoleh dana pendidikan dasar di SD Negeri Todanan 1.
2. Untuk mendeskripsikan karakteristik alokasi dana pendidikan dasar di SD Negeri Todanan 1.

3. Untuk mendeskripsikan karakteristik jaringan kerja pengelolaan dana pendidikan dasar di SD Negeri Todanan 1.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk Kepala Sekolah, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu para kepala sekolah sebagai bahan masukan kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja keuangan sekolah.
- b. Untuk Instansi terkait, hasil penelitian ini nantinya dapat dipergunakan dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber dana sekolah.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi keilmuan, di UMS, khususnya Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya dalam hal manajemen keuangan sekolah.

E. Daftar Istilah

1. Desentralisasi pendidikan, penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada daerah (kabupaten/kota) dalam bidang pendidikan.
2. Instrumen legal adalah ketentuan-ketentuan resmi yang mengatur suatu tindakan.
3. *School-based Management* artinya Manajemen Berbasis Sekolah.

4. *Community-based education* artinya pendidikan berbasis masyarakat.
5. Konsepsi dasar manajemen pendidikan artinya nilai-nilai budaya yang menjadi landasan dalam pengelolaan pendidikan.
6. Figur sentral artinya tokoh sentral.